

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 merupakan laporan penyelenggaraan pemerintah selama tahun 2024 yang ditujukan kepada Bupati Mojokerto melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto. Disisi lain juga merupakan salah satu bentuk perwujudan pertanggungjawaban kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto secara tertulis.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dapat terlaksana karena adanya kerja sama yang baik dari para stakeholders, yaitu Kepala Satuan Kerja beserta staf, Tim Penyusun LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2024, dan pihak-pihak lainnya yang terkait.

Perlu disadari bahwa Penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 merupakan pelaksanaan penjabaran program dan kegiatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun 2021–2026. Oleh sebab itu LKjIP ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian guna perbaikan dimasa yang akan datang. Selanjutnya disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung kelancaran pelaksanaan program.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam pengembangan dan perencanaan program pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Mojokerto, 5 Februari 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Mojokerto

Drs. NUGRAHA BUDHI SULISTYA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690915 198903 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto berkontribusi untuk mewujudkan Misi 1 (satu) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto sesuai kewenangannya. Pada misi ke 1 (satu), yakni *“Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan”*. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto menetapkan tujuan yang ingin dicapai yakni *Meningkatnya Kualitas Keimanan dan ketakwaan Masyarakat*, dengan 6 (enam) program yang dilaksanakan yakni: 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota; 2) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan; 3) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik; 4) Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan; 5) Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya; dan 6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Untuk pencapaian pada Misi 1 (satu) dengan sasaran *Meningkatnya Keharmonisan dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat, baik antar Suku, Agama, dan Golongan*, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto menetapkan Indikator Sasaran yaitu *Persentase Menurunnya Kejadian Konflik umat beragama dan Konflik Sosial di Kabupaten Mojokerto*, dan sampai akhir tahun 2024 di Kabupaten Mojokerto **tidak ada kejadian/kasus** konflik umat beragama yang berarti ada penurunan kejadian sebesar 100% dari tahun 2023 (2 kasus), sedangkan kejadian kasus konflik sosial terdapat kejadian 8 kasus dan dapat diselesaikan sebanyak 8

kasus, dengan persentase sebesar 100 persen capaian kinerja. Berdasarkan hal tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto berhasil dalam mencegah kejadian konflik.

Adapun anggaran yang ditetapkan pada tahun 2024 untuk menunjang tercapainya sasaran ini adalah sebesar Rp. 71.101.960.901,00 dengan realisasi sebesar Rp. 70.040.371.896,67 atau sebesar 98,51 persen.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 1

IKHTISAR EKSEKUTIF..... 2

DAFTAR ISI 4

DAFTAR TABEL..... 6

DAFTAR GAMBAR 7

BAB I 1

PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 2

 C. Maksud dan Tujuan..... 4

 D. Dasar Hukum..... 5

 E. Isu – Isu Strategis/ permasalahan Utama..... 6

BAB II 7

PERENCANAAN KINERJA 7

 A. Rencana Strategis 7

 Tujuan dan Sasaran..... 8

 Program 8

 B. Rencana Strategis Tahun 2021-2026 8

BAB III 12

AKUNTABILITAS KINERJA 12

 A. Pengukuran Capaian Kinerja /Sasaran 13

 1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2024 14

 2. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra 16

 3. Analisa Capaian Kinerja..... 16

 4. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan 25

 B. Akuntabilitas Keuangan (Cost Per Outcome)..... 26

 1. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024 29

2. Langkah–langkah yang dilaksanakan untuk memenuhi target kinerja..... 32

BAB IV 34

PENUTUP..... 34

A. KESIMPULAN..... 34

B. LANGKAH PERBAIKAN 34

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Matrik Rencana Strategis..... 9

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 10

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024..... 11

Tabel 3. 1 Pengkategorian Capaian Kinerja..... 12

Tabel 3. 2 Pencapaian Kinerja 14

Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 - 2024..... 14

Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra..... 16

Tabel 3. 5 Target dan Kinerja Sasaran 1 17

Tabel 3. 6 Target dan Kinerja Sasaran 2 17

Tabel 3. 7 Target dan Kinerja Sasaran 3 18

Tabel 3. 8 Capaian Kinerja Kegiatan..... 18

Tabel 3. 9 Analisis Anggaran Tahun 2024..... 26

Tabel 3. 10 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024..... 30

DAFTAR GAMBAR

Struktur Organisasi 1. 1 4

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan Kinerja merupakan produk akhir Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakannya.

Laporan Kinerja dibuat dalam rangka memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat dan pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu sebagai instansi pemerintah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto berkewajiban menyusun Laporan Kinerja tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja untuk kedepannya.

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu dokumen yang berisi gambaran mengenai perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 merupakan media untuk mengeksplorasi sejauh mana upaya dalam menyesuaikan dinamika tuntutan perubahan masyarakat yang terus berkembang. LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna dan bertanggungjawab (*akuntabel*).

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka terhadap pelaporan yang menyangkut Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2024. Selain itu, penyusunan LKjIP ini juga merupakan tindak lanjut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto dalam merespon Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan disegala bidang Pembangunan Nasional sesuai dengan iklim reformasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak lanjut dari Tap MPR tersebut adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto berkewajiban mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto.

Hal terpenting dari latar belakang penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto selain memenuhi tuntutan untuk berakuntabilitas adalah adanya keinginan yang kuat untuk mewujudkan keseimbangan antara akuntabilitas, partisipasi dan transparansi yang merupakan pilar perwujudan tata pemerintahan yang baik. sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

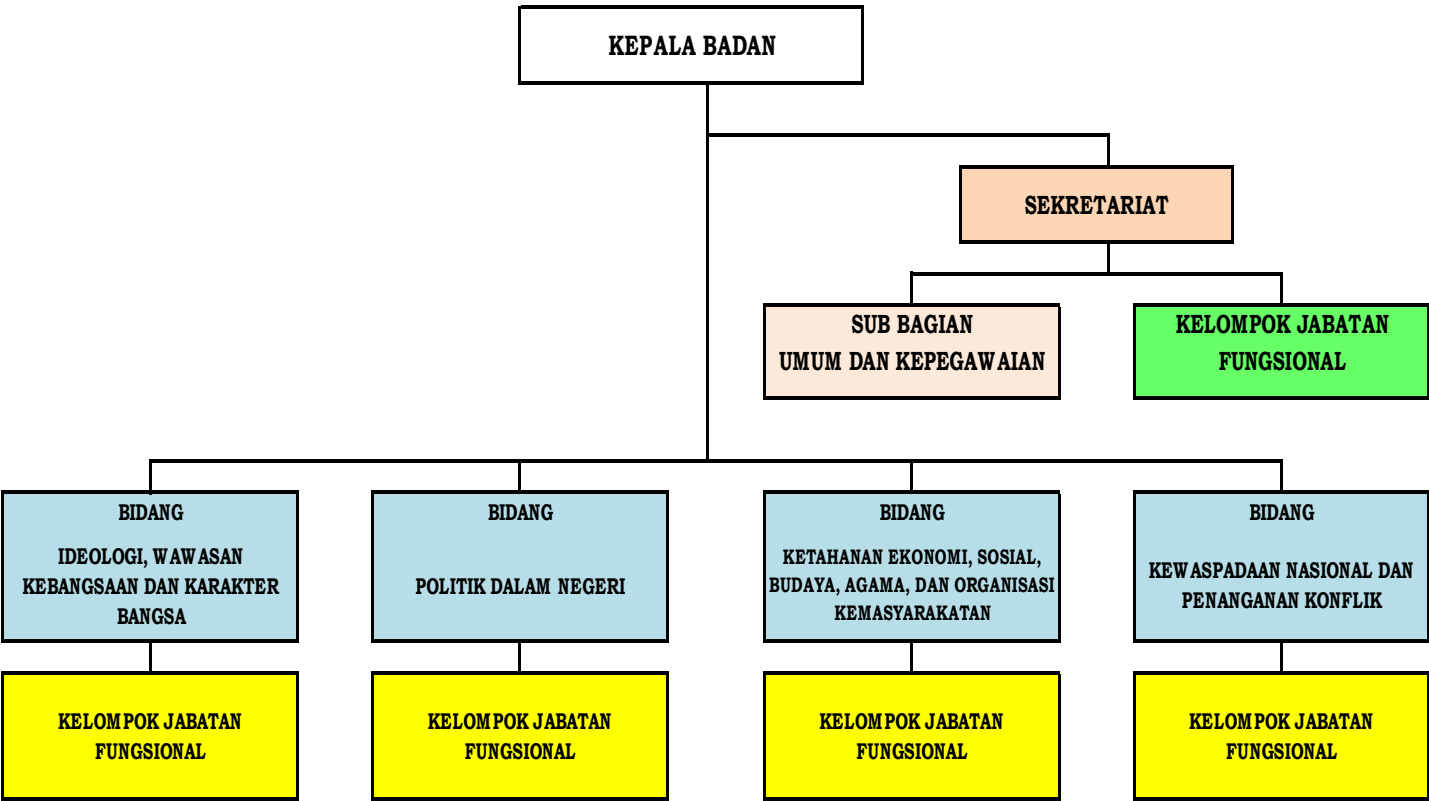
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto. Ketentuan selanjutnya tercantum dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 101 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto nomor 101 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto, bab II pasal 3 menjelaskan susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - Fungsional Perencanaan;
 - Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah.
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan.
4. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan.
5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan.
6. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan.

Gambar
Struktur Organisasi 1. 1



Sumber : Perbup Mojokerto Nomor 101 Tahun 2021

C. Maksud dan Tujuan

Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permen-PAN&RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Daerah, maka dokumen LKjIP ini disusun dengan maksud agar setiap unsur penyelenggaraan negara bertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dimandatkan kepada organisasi berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Didalam LKjIP ini terkandung instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama TA 2024 ;

- 1. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik pada Tahun 2024; dan

2. Hasil evaluasi diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
9. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Mojokerto;

E. Isu – Isu Strategis/ permasalahan Utama

Dalam penetapan tujuan dan sasaran, didasarkan isu-isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi serta berpengaruh dalam kesatuan bangsa yang diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Isu-isu strategis yang dihadapi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto, diantaranya:

1. Masih banyaknya permasalahan-permasalahan Ipoleksosbud, SARA dan batas wilayah yang bisa menjadi potensi konflik di masyarakat;
2. Masih kurangnya penanganan dalam mencegah dan deteksi dini terhadap potensi konflik di masyarakat;
3. Belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap keputusan 2 (dua) Menteri tentang Peraturan Bersama nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;
4. Masih belum meratanya wawasan politik masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan berpolitik dan berdemokrasi yang sehat,
5. Lunturnya pemahaman masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan dan 4 pilar kebangsaan (ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal ika dan NKRI) sejak dihapusnya P-4 serta supremasi Hukum dan HAM,
6. Timbulnya paham-paham radikal dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menangkal adanya ancaman, tantangan, hambatan, gangguan terhadap ipoleksosbud HanKam,
7. Partisipasi masyarakat terkait keamanan lingkungan belum maksimal.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) ini adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto. Renstra merupakan rencana pembangunan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini sebagai langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

Visi dan Misi

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026, maka ditetapkanlah Visi Kabupaten Mojokerto yang merupakan visi dari Kepala Daerah terpilih, yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Dari Visi yang telah ditetapkan maka untuk menyelaraskan dalam gerak dan langkah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi Kabupaten Mojokerto, Kepala Daerah terpilih menetapkan 4 (Empat) Misi. Dari empat misi tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto melaksanakan misi 1 (satu) bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Mojokerto, yaitu :

Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan

Tujuan dan Sasaran

Untuk mendukung dan mencapai visi dan misi pemerintah Kabupaten Mojokerto, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto merumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut :

1. Tujuan

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi. Adapun rumusan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto adalah *Meningkatnya Kualitas Keimanan dan ketakwaan Masyarakat.*

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto terkait dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan, atau bulanan. Adapun sasaran strategis di dalam perencanaan strategik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto adalah *Meningkatnya Keharmonisan dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat, baik antar Suku, Agama, dan Golongan.*

Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu instansi pemerintah untuk mendapatkan hasil yang berguna demi terwujudnya visi, misi, tujuan, dan sasaran dari instansi pemerintah. Adapun program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto untuk tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- 3) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
- 4) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya; dan
- 6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

B. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Mojokerto telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berisi tujuan, sasaran, dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto. Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto.

Matriks Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 terdiri dari sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai selama 5 tahun mendatang sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Matrik Rencana Strategis
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Keimanan dan ketakwaan Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	70,68	71,88	73,08	74,28	75,48	76,68
Meningkatnya Keharmonisan dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat, baik antar Suku, Agama, dan Golongan	Persentase Menurunnya Kejadian Konflik Umat Beragama dan Konflik Sosial di Kab Mojokerto	63,00	60,00	59,75	55,50	53,75	52,50
	Persentase Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	84,50	85,00	85,05	85,07	85,09	85,15
	Persentase Partisipasi Masyarakat	78,66	78,67	78,68	78,69	78,70	78,71
	Persentase LSM dan Ormas yang Aktif	97,05	97,05	97,07	97,09	97,13	97,15
	Persentase Menurunnya kejadian konflik Umat Beragama	20,00	15,00	13,50	12,50	10,50	10,00
	Persentase Menurunnya Konflik Sosial di Kab Mojokerto	89,00	88,95	88,93	88,91	88,90	88,85
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, dan Transparan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	67,00	67,50	67,65	67,75	68,00	68,50
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,87	79,77	80,67	81,57	82,47	83,37
	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai Sesuai Target	90,00	92,50	93,00	94,00	94,75	95,00
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90,00	91,50	93,00	94,00	94,75	95,00
	Indeks Profesionalitas ASN Perangkt Daerah	72,00	72,50	72,55	72,65	72,75	73,00

Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dijelaskan bahwa Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Secara umum format perjanjian kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Mojokerto

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya Keharmonisan dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat, baik antar Suku, Agama, dan Golongan	Persentase Menurunnya Kejadian Konflik umat beragama dan Konflik Sosial di Kabupaten Mojokerto		42,50 %

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERA		TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 %
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,75 %
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	91 %
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan inovasi yang mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		1 inovasi

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.221.119.901,00	APBD 2024 (DAU)
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.500.000.000,00	APBD 2024 (DAU)
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Poltik	64.701.280.000,00	APBD 2024 (DAU)
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasab Organisasi Kemasyarakatan	835.000.000,00	APBD 2024 (DAU)
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	300.000.000,00	APBD 2024 (DAU)
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	765.000.000,00	APBD 2024 (DAU)

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Mojokerto

No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,57 (A)
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,95 %
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	86,57 (Tinggi)
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		1 Inovasi

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Keharmonisan dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat, baik antar Suku, Agama, dan Golongan	Persentase Menurunnya Kejadian Konflik umat beragama dan Konflik Sosial di Kabupaten Mojokerto	20 %

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.349.426.901,00	PAPBD 2024 (DAU)
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.334.325.700,00	PAPBD 2024 (DAU)
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Poltik	64.687.953.000,00	PAPBD 2024 (DAU)
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasab Organisasi Kemasyarakatan	772.455.300.00	PAPBD 2024 (DAU)
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	300.000.000,00	PAPBD 2024 (DAU)
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	657.800.000,00	PAPBD 2024 (DAU)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Mojokerto selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Mojokerto yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Mojokerto. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja sasaran, sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	91% s.d ≤100%	Sangat tinggi
2	76% s.d ≤ 90%	Tinggi
3	66% s.d ≤ 75%	Sedang

4	51% s.d ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Mojokerto dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto.

A. Pengukuran Capaian Kinerja /Sasaran

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan kinerja yang diharapkan. Adapun pengukuran kinerja tersebut dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{2 \times \text{Rencana} - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Hal ini dapat dilihat dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja untuk tahun 2024, seluruhnya telah dapat dilaksanakan dengan baik.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengumpulkan dan memanfaatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan tepat sehingga bermanfaat bagi pengambilan

keputusan dan perbaikan dengan tidak meninggalkan prinsip efisiensi, efektifitas dan penghematan biaya. Analisis tentang pencapaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Capaian Kinerja Tahun 2024 di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada tabel berikut :

Membandingkan antara target dan realisasi tahun 2024

Rincian tingkat capaian kinerja masing masing indikator kinerja sasaran tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Pencapaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Keharmonisan dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat, baik antar Suku, Agama, dan Golongan	Persentase Menurunnya Kejadian Konflik umat beragama dan Konflik Sosial di Kabupaten Mojokerto	20%	11,7%	141,5
2	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,57	80,5	98,7
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,95%	98,51%	101,6
		Indeks Profesionalisme ASN	86,57	83,30	96,3
3	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1	1	100

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa target yang ditetapkan di tahun 2024 untuk masing–masing sasaran strategis dengan indikator kinerja, realisasinya ada pada sasaran kedua yang tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Indeks Profesionalisme ASN sedangkan untuk sasaran Pertama, dan ketiga dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2024

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja setiap tahunnya, maka perlu adanya perbandingan capaian kinerja dari tahun ke tahun. Kinerja Bakesbangpol tahun 2024 mengacu pada Renstra Bappeda Tahun 2021 – 2026. Realisasi kinerja Bakesbangpol tahun 2021 s.d. tahun 2024 untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 - 2024

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis Renstra Bakesbangpol Tahun 2021-2026	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Meningkatnya Keharmonisan dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat, baik antar Suku, Agama, dan Golongan	Persentase Menurunnya Kejadian Konflik umat beragama dan Konflik Sosial di Kabupaten Mojokerto							42,50%	29,14%		20%	11,7%	141,5
2	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah							79,61	79,63		81,57(A)	80,5	98,7
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah							91,50%	96,94%		96,95%	98,51%	101,6
		Indeks Profesionalisme ASN							90,00	86,23		86,57	83,30	96,3
3.	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan							1 inovasi	1 inovasi		1 inovasi	1 inovasi	100

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir periode Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan (Tingkat Capaian terhadap Target Akhir Renstra)
1	Meningkatnya Keharmonisan dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat, baik antar Suku, Agama, dan Golongan	Persentase Menurunnya Kejadian Konflik umat beragama dan Konflik Sosial di Kabupaten Mojokerto	20%	11,7%	141,5
2	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,57	80,5	98,7
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,95%	98,51%	101,6
		Indeks Profesionalisme ASN	86,57	83,30	96,3
3	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 inovasi	1 inovasi	100

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa target yang ditetapkan di tahun 2024 untuk masing–masing sasaran strategis dengan indikator kinerja, realisasinya ada pada sasaran kedua yang tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Indeks Profesionalisme ASN sedangkan untuk sasaran Pertama, dan ketiga dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Analisa Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja didasarkan atas hasil pengukuran kinerja pelaksanaan program/kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan. Sasaran kinerja strategis tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran tersebut. Berikut analis capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 sebagai berikut :

a. **Sasaran Strategis 1** : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih dan Transparan

Sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto pertama yaitu Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Pada sasaran strategis ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto belum dapat mencapai nilai yang ditargetkan dikarenakan masih kurangnya dukungan dari pegawai dalam pemenuhan dokumen SAKIP.

Tabel 3. 5 Target dan Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,57	80,50	98,68
2	Indeks Profesionalisme ASN	86,57	83.30	96,22

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja belum mencapai target yang ditetapkan.

b. **Sasaran Strategis 2** : Meningkatnya Kualitas Keimanan dan ketakwaan Masyarakat

Sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto kedua yaitu Meningkatnya Kualitas Keimanan dan ketakwaan Masyarakat dengan indikator kinerja utama “*Indeks kerukunan Umat beragama (IKUB)*” merupakan sasaran dari misi satu kepala daerah terpilih yang diampuh oleh tiga perangkat daerah : 1) Satpol PP, 2) BAKESBANGPOL, dan 3) Bagian Kesra setda Kabupaten Mojokerto. Hasil realisasi kinerja sasaran 2 sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 6 Target dan Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	73,08	81,04	110,89

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka target sasaran 2 tercapai.

c. **Sasaran Strategis 3** : Meningkatnya Keharmonisan dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat baik antar suku, agama dan golongan

Sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto yang ketiga yaitu *Meningkatnya Keharmonisan dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat baik antar suku, agama dan golongan*, dengan indikator kinerja Persentase Implementasi Nilai-Nilai Pancasila, Persentase Partisipasi Masyarakat,

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Persentase LSM dan Ormas yang Aktif, Persentase Menurunnya kejadian konflik Umat Beragama, dan Persentase Menurunnya Konflik Sosial di Kabupaten Mojokerto. Pada tahun 2024 kejadian konflik sosial maupun konflik umat beragama yang terjadi pada masyarakat dapat dikendalikan dan diselesaikan dengan damai, disamping itu kejadian-kejadian konflik pada masyarakat dapat dicegah sebelum meluas bersama dengan jajaran samping / stakeholder.

Tabel 3. 7 Target dan Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Kinerja Utama	Target	realisasi	ersentase
1	Persentase Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	85,05%	100%	117,58
2	Persentase Partisipasi Masyarakat	78,68%	100%	127,10
3	Persentase LSM dan Ormas yang Aktif	97,07%	100%	103,02
4	Persentase Menurunnya kejadian konflik Umat Beragama	13,50%	100%	740,70
5	Persentase Menurunnya Konflik Sosial pada masyarakat di Kabupaten Mojokerto	88,93%	70,59%	79,38

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang menjadi tanggung jawab organisasi. Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto digambarkan dengan capaian sasaran sebagaimana komitmen kinerja Tahun 2024.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya, pada masing-masing indikator kinerja setiap sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan, disamping itu diperbandingkan pula dengan realisasi yang telah dicapai Tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut selengkapnya diuraikan pada tabel capaian kinerja pada halaman berikutnya.

*Tabel 3. 8 Capaian Kinerja Kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto
Tahun 2024*

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
I	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih dan Transparan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,61	79,63	100,03%
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai Sesuai Target	92,50	96,94	90,09
1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	100%

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Lap	6 Lap	100%
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92,50	96,94	100,92
2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang	17 orang	85,00%
4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	97,50	100	121,95%
4.1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
4.2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%
4.3		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%
4.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dok	1 Dok	100%
4.5		Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%
4.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	12 Lap	100%

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Targ et	Realisasi	Capaian Kinerj a
1	2	3	4	5	6	7
5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	97,00	100	107,53%
5.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	100%
5.2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	100%
6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	95,00	52,38	55,14%

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Targ et	Real isasi	Capaia n Kinerj a
1	2	3	4	5	6	7
6.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	6 unit	100%
6.2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%
6.3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	7 unit	6 unit	100%
II	Meningkatnya Keharmonisan dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat baik antar suku, agama dan golongan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	85,00	100	120,48%
7		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3 sub keg	3 sub keg	100%
7.1		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jml Orang yg Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bid Ideologi Wasbang, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	460 orang	460 orang	100%
7.2		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jml Orang yg Mengikuti Koordinasi di Bid Ideologi Wasbang, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	220 orang	220 orang	100%
7.3		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jml Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidng Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Lapo ran	1 Lapo ran	100%

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Real isasi	Capaia n Kinerj a
1	2	3	4	5	6	7
III		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partisipasi masyarakat	78,67	100	127,13%
8		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Jml sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pend Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	3 sub keg	3 sub keg	100 %

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
8.1		Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan ParPol, Pemilu/ Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik			
		Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jml Orang yg Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bid Pend Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/ Pemilikada, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	265 orang	50 orang	100 %
		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jml Orang yg Mengikuti Koordinasi di Bid Pend Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada , serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	90 orang	90 orang	100 %
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jml Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bid Pend Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/ Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	17 Lap	15 Lap	100 %
8.2						
8.3						

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
IV		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase LSM dan ORMAS Yang Aktif	99,00	99,22	99,97%
9		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah LSM dan ORMAS yang terdaftar	240 LSM / ORMAS	255 LSM / ORMAS	106,25%
9.1		Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jml Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300	300	75,00%
9.2		Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jml Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	24	24	100%
9.3		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jml Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Lap	1 Lap	100%
V		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Penurunan Konflik antar umat beragama	15,00	2,00	125,00
10		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	2 sub keg	2 sub keg	100%

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
10.1		Pelaksanaan Kebijakan diBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	160 orang	160 orang	100 %
10.2		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 orang	100 orang	100 %
VI		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penurunan Konflik Sosial di Kab Mojokerto	74,75	25,88	33,44
11		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah kejadian Konflik Sosial/ Unjuk Rasa	20	5	25,00
11.1		Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jml Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, POA, TKA dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang	1 dok	1 dok	100 %

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
			Disusun			
11.2		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jml Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, POA, TKA dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 dok	1 dok	100 %
11.3		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jml Orang yg Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, POA, TKA dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	225 orang	7 raker	87,5 0%
11.4		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jml Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, POA, TKA dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	56 orang		87,5 0

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
11.5		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jml Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, POA, TKA dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	5 Lap		87,50
11.6		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2 dok		88,24

4. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Secara umum dalam pencapaian sasaran tahun 2024 masih belum mencapai target. Selain permasalahan pada anggaran dalam mencapai target kinerja yang menjadi permasalahan lain pada pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto adalah :

- 1) Urgensi peningkatan kewaspadaan daerah yang dapat mengganggu stabilitas keamanan.
- 2) Radikalisme dan terorisme masih tetap berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Mojokerto.
- 3) Menurunnya pemahaman masyarakat terhadap empat konsensus dasar Bangsa (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika).
- 4) Masih minimnya pembinaan nilai-nilai Pancasila, ancaman radikalisme dan penolakan terhadap Pancasila.
- 5) Belum optimalnya dalam penguatan ideologi, wawasan kebangsaan, revolusi mental.
- 6) Meningkatnya ancaman kekerasan dari kelompok masyarakat kebebasan berserikat berkumpul dan berpendapat.
- 7) Maraknya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Mojokerto.
- 8) Rendahnya kesadaran ormas untuk melaporkan keberadaanya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto.
- 9) Terbatasnya Pendidikan Politik pada masyarakat dan generasi muda.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut kedepannya akan ditempuh hal-hal sebagai

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
berikut :

- 1) Memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan kepekaan dan kewaspadaan dalam menyikapi munculnya permasalahan situasi kondisi daerah.
- 2) Melaksanakan koordinasi intelijen daerah secara intensif.
- 3) Melaksanakan kegiatan pemantauan secara intensif terhadap kemungkinan aksi terorisme serta kegiatan kelompok radikal lainnya.
- 4) Meningkatkan koordinasi aparat keamanan.
- 5) Melaksanakan pendidikan/ sosialisasi wawasan kebangsaan, revolusi mental dan penguatan ideologi kepada masyarakat melalui para tokoh masyarakat, kepada organisasi kemasyarakatan maupun aparatur pemerintah.
- 6) Memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan penguatan wawasan kebangsaan, revolusi mental dan penguatan ideologi.
- 7) Pembinaan pembauran bangsa dan kerukunan hidup beragama melalui fasilitasi terhadap ormas yang bergerak dibidangnya seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
- 8) Meningkatkan kesadaran dari ormas tentang pentingnya untuk melaporkan keberadaanya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto.
- 9) Meningkatkan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.
- 10) Melaksanakan sosialisasi pendidikan politik bagi generasi muda dan perempuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu (Pilkada, Pileg, Pilpres).

B. Akuntabilitas Keuangan (Cost Per Outcome)

Analisis anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dengan anggaran tahun sebelumnya 2023 dapat dilihat pada tabel di halaman berikutnya :

Tabel 3. 9 Analis Anggaran Tahun 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)			% Selisih
		Th. 2024	Th. 2023	Selisih	
1	2	3	4	5	6
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.299.426.901	3.856.130.901	556.704.000	16,87
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000	0	0
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000	7.500.000	0	0
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000	7.500.000	0	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.958.415.000	2.965.119.000	6.704.000	0,22
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.958.415.000	2.965.119.000	6.704.000	0,22
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0	0

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)			% Selisih
		Th. 2024	Th. 2023	Selisih	
1	2	3	4	5	6
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0	0
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	122.895.000	122.895.000	0	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000	20.000.000	0	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.500.000	13.500.000	0	0
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.000.000	9.000.000	0	0
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	2.000.000	0	0
	Penyediaan Bahan/ Material	18.395.000,00	18.395.000	0	0
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0	0	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000	60.000.000	0	0
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	0	550.000.000	500.000.000	0
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	550.000.000	0	0
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	123.616.901	123.616.901	0	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.901	10.000.901	0	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113.616.000	113.616.000	0	0
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	79.500.000	79.500.000	0	0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.000.000	26.000.000	0	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000	40.000.000	0	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.500.000	13.500.000	0	0
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan		1.530.198.200		
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	1.334.325.700	1.530.198.200	195.872.500	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	208.718300	1.327.490.100	14.	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	92.533.400	127.706.100		
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100.000.000	75.000.000		

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)			% Selisih
		Th. 2024	Th. 2023	Selisih	
1	2	3	4	5	6
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	933.074.000	36.442.937.516		
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>		36.442.937.516		
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan an Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		201.376.900		
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		46.970.000		
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		36.194.590.616		
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		1.053.000.000		
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>		1.053.000.000		
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		290.000.000		
	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		723.000.000		
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		40.000.000		
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya		100.000.000		
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>		100.000.000		

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)			% Selisih
		Th. 2024	Th. 2023	Selisih	
1	2	3	4	5	6
	Pelaksanaan Kebijakan diBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		100.000.000		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		0		
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		865.760.000		
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>		865.760.000		
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		20.000.000		
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		20.000.000		
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		300.000.000		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		55.760.000		
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan diBidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		170.000.000		
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		300.000.000		

1. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024

Adapun kinerja pengelolaan keuangan yang digunakan dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2024, dari pagu anggaran kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 sebesar Rp. 71.101.960.901,00 penyerapan/realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 70.040.371.896,67 atau 98,51 % yang terbagi pada 6 (enam) program dengan 11 (sebelas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan, terinci sebagai berikut :

Tabel 3. 10 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)		Capaian Program/ Kegiatan (%)
		Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.299.426.901	3.299.426.901	98,67
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	12.343.600	82,28
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000	7.399.900	98,67
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000	4.943.700	65,92
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.958.415.000	2.958.415.000	90,00
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.958.415.000	2.958.415.000	90,00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	122.895.000	146.568.924	119,26
3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000	68.290.700	97,56
3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.500.000	12.972.500	96,09
3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.000.000	7.252.500	80,58
3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	1.871.000	93,55
3.5	Penyediaan Bahan/ Material	18.395.000	14.053.400	76,40
3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000	42.128.824	70,21
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.616.901	118.791.433	96,09
4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.901	7.781.977	77,81
4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113.616.000	111.009.456	97,71
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.500.000	77.347.343	97,29
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.000.000	24.751.843	95,20
5.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000	39.125.500	97,81
5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.500.000	13.470.000	99,76
II	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.334.325.700	1.270.206.428	95,20
6	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.334.325.700	1.270.206.428	95,20
6.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	208.718.300	198.961.481	95,33
6.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	92.533.400	81.741.600	88,34

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)		Capaian Program/ Kegiatan (%)
		Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5
6.3	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100.000.000	94.713.600	94,71
6.4	Pembentukan Paskibraka	933.074.000	894.789.747	95,90
III	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	64.687.953.000	64.345.634.720,67	99,47
7	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>	64.687.953.000	64.345.634.720,67	99,47
7.1	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan an Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	187.782.000	115.469.700	61,49
7.2	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0	0	0,00
7.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	64.500.171.000	64.230.165.020,67	99,58
IV	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	772.455.300	696.837.750	90,21
8	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	772.455.300	696.837.750	90,21
8.1	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	182.455.300	116.226.750	63,70
8.2	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	550.000.000	550.000.000	100,00
8.3	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	40.000.000	30.611.000	76,53
V	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	300.000.000	212.434.850	70,81
9	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	300.000.000	212.434.850	70,81
9.1	Pelaksanaan Kebijakan diBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300.000.000	212.434.850	70,81

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)		Capaian Program/ Kegiatan (%)
		Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5
VI	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	657.800.000	495.732.860	75,36
10	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	657.800.000	495.732.860	75,36
10.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	13.900.000	12.917.500	92,93
10.2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	13.900.000	12.968.250	93,30
10.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	225.000.000	183.735.010.	81,66
10.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	60.000.000	37.069.100	61,78
10.5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	120.000.000	59.822.500	49,85
10.6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	225.000.000	189.220.000	84,10
	JUMLAH SELURUHNYA	71.101.960.901,00	70.040.371.896,67	98,51

2. Langkah–langkah yang dilaksanakan untuk memenuhi target kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto tahun 2024, maka berikut ini solusi dan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto selanjutnya, sebagai berikut :

1. Membuat perencanaan yang seksama merupakan salah satu langkah guna menekan jarak antara target dan realisasi.
2. Proses perencanaan dan persiapan kegiatan agar lebih baik lagi untuk mengurangi adanya permasalahan ketidaksesuaian perencanaan dengan kondisi eksisting (yang sudah ada) sebelum pelaksanaan kegiatan.

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3. Pada tahun mendatang efisiensi anggaran adalah hal yang harus dilakukan sebagai langkah Perangkat Daerah untuk memenuhi target dengan dana yang tersedia.
4. Jumlah Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto agar ditambah, sedangkan yang sudah ada tetap dioptimalkan.
5. Pada saat perencanaan, pemrograman, penganggaran maupun implementasi, semua komponen tersebut harus terintegrasi dengan baik sehingga apa yang sudah ditargetkan dapat tercapai dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Mengevaluasi perencanaan dan realisasi tahun sebelumnya sebagai bahan perbaikan kinerja dalam penyusunan rencana tahun selanjutnya.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2024, serta penetapan Kinerja Tahun 2024 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*).

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai merupakan berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

A. KESIMPULAN

Hasil dari LKJIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja sasaran ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana.
- 2) Dari analisis 3 (tiga) sasaran, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur.

B. LANGKAH PERBAIKAN

Langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan sasaran strategis adalah sebagai berikut :

- a. Memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan kepekaan dan kewaspadaan dalam menyikapi munculnya permasalahan situasi kondisi daerah.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan intelijen daerah secara intensif.
- c. Melaksanakan kegiatan pemantauan secara intensif terhadap kemungkinan aksi terorisme serta kegiatan kelompok radikal lainnya.
- d. Meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan.
- e. Melaksanakan bimbingan teknis/sosialisasi wawasan kebangsaan, revolusi mental dan penguatan ideologi kepada masyarakat melalui para tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, generasi muda maupun aparatur pemerintah.

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- f. Memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan penguatan wawasan kebangsaan, revolusi mental dan penguatan ideologi.
- g. Pembinaan pembauran bangsa dan kerukunan hidup beragama melalui fasilitasi terhadap ormas yang bergerak dibidangnya seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
- h. Meningkatkan kesadaran dari ormas tentang pentingnya untuk melaporkan keberadaanya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto.
- i. Meningkatkan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.
- j. Melaksanakan sosialisasi pendidikan politik bagi generasi muda dan perempuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu (Pilkada, Pileg, Pilpres).
- k. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan jajaran samping/ Instansi terkait.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan, penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan periode yang akan datang.

Mojokerto, Februari 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Mojokerto

Drs. NUGRAHA BUDHI SULISTYA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690915 198903 1 003

